



PENGUATAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DIMENSI PENYUSUN IPM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PENDAHULUAN

Penduduk menjadi asset berharga Indonesia dalam menggerakkan roda pembangunan nasional. Hal yang sama berlaku untuk Kabupaten Lombok Barat. Sebagai daerah berpenduduk terbanyak ketiga di Nusa Tenggara Barat (BPS, 2024), Pemerintah Lombok Barat selanjutnya menjadikan perbaikan kualitas penduduk sebagai salah satu sasaran pembangunan daerah. Penduduk yang berkualitas akan menjadikan pembangunan di masa selanjutnya menjadi lebih terarah dan optimal.

Kualitas penduduk suatu negara dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menggambarkan perkembangan keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas manusia. Adapun komponen penyusun IPM terdiri dari tiga dimensi dasar yakni dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dengan kata lain, IPM adalah indikator komplit yang mampu menggambarkan kondisi manusia dari segala dimensi kehidupan.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang menjadi sasaran makro pembangunan pada RPJMN 2020 – 2024. Untuk mendukung RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menuangkan sasaran pembangunan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Angka IPM juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Angka IPM menjadi fokus kesejahteraan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Barat 2019-2024. Angka IPM menjadi tolak ukur peningkatan kualitas manusia.

Angka IPM Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 menyentuh angka 72,18 dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun angka IPM tahun 2023 merupakan angka tertinggi dalam satu dasawarsa, akan tetapi secara pertumbuhan angka IPM tidak melaju terlalu signifikan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menerapkan banyak kebijakan. Namun, terdapat beberapa faktor yang diduga menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan semestinya, mulai dari sisi kultur budaya masyarakat, ketidakmerataan pendapatan, dan ketersediaan anggaran dari pemerintah dan masih banyak kemungkinan faktor lainnya. Arah kebijakan yang berpihak pada perbaikan dimensi penyusun IPM akan meningkatkan nilai IPM sekaligus pertumbuhannya.

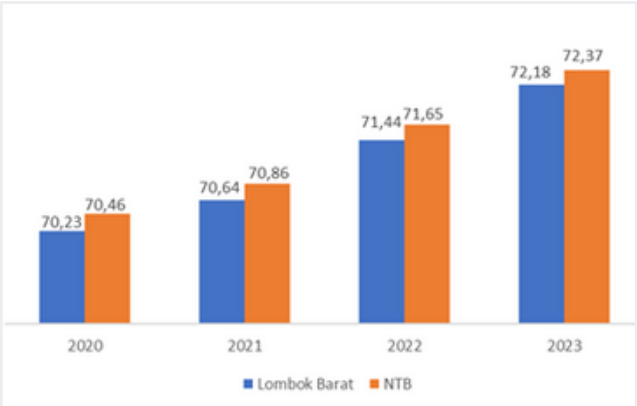
Kajian ini memotret IPM dari berbagai dimensi penyusunnya di Lombok Barat. Output kajian berupa rekomendasi diharapkan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 agar kebijakan dapat lebih tajam dan tepat sasaran.

PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat tersenyum karena IPM Lombok Barat tahun 2023 berada di titik tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Keseluruhan dimensi IPM, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, berkontribusi terhadap peningkatan angka tersebut. IPM Lombok Barat pada tahun 2020 sebesar 70,23 dan terus meningkat menjadi 72,18 pada tahun 2023. Angka ini masuk dalam kategori tinggi. Namun rupanya kenaikan IPM di Lombok Barat masih selalu berada di bawah IPM Provinsi NTB.

Pesan Kunci :

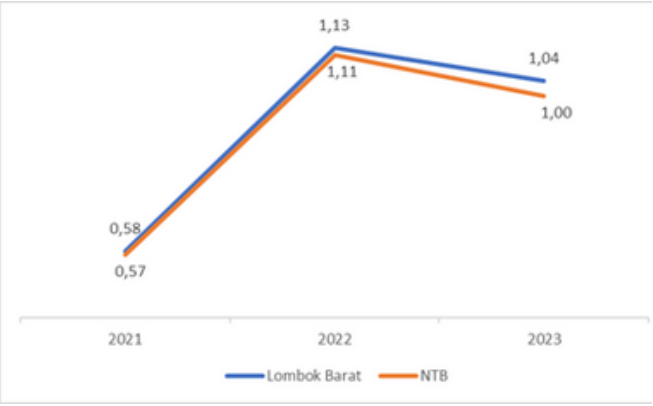
- Angka IPM Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 menyentuh angka 72,18 dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,04 persen dibanding tahun sebelumnya.
- Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup, tidak optimalnya pembangunan pendidikan, dan penurunan pengeluaran riil per kapita.
- Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka HLS dan RLS adalah kemiskinan.
- Arah kebijakan yang berpihak pada perbaikan dimensi penyusun IPM akan meningkatkan nilai IPM sekaligus pertumbuhannya.



Gambar 1. Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat, 2020-2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

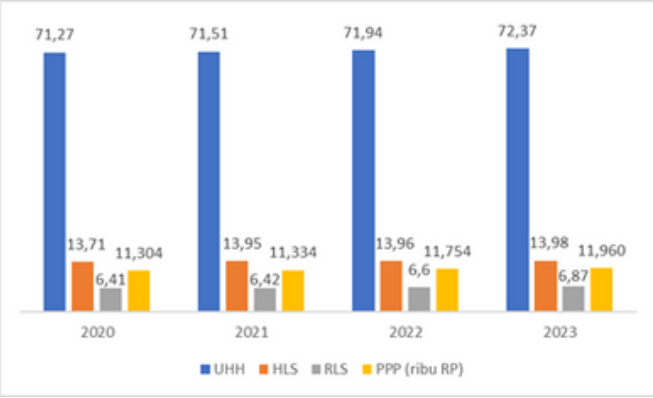
Jika dibuat urutan angka IPM seluruh kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Lombok Barat menempati urutan tertinggi keempat setelah Kota Mataram, Kota Bima, dan Sumbawa Barat. Sebagai kabupaten terdekat dari ibukota provinsi, Lombok Barat nyatanya tertinggal cukup jauh dari Kota Mataram. Secara alamiah, semestinya penduduk Lombok Barat menerima pengaruh positif dari pembangunan Kota Mataram. Namun tampaknya hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan.

Untuk menilai kinerja pemerintah suatu daerah tidak cukup dengan melihat capaian IPM saja, namun harus melihat laju pertumbuhan dari IPM itu sendiri. Peningkatan laju menandakan adanya upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai di semua dimensi penyusun IPM. Pertumbuhan IPM Lombok Barat dari tahun 2021-2023 cukup fluktuatif. Pada rentang 2021-2022, pertumbuhan IPM Lombok Barat meningkat, namun kemudian mengalami perlambatan pada 2023. Seperti yang terlihat pada Gambar 2, pertumbuhan IPM Lombok Barat pada tahun 2023 menurun sebanyak 1,04 jika dibandingkan tahun 2022.



Gambar 2. Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat, 2020-2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

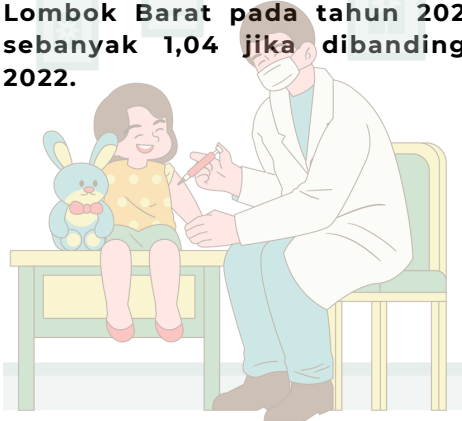
Pada daerah yang baru berkembang, biasanya pertumbuhan IPM akan naik signifikan. Kondisi tersebut akan terus berlangsung sampai pertumbuhan mencapai titik stabil. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup, tidak optimalnya pembangunan pendidikan, dan penurunan pengeluaran riil per kapita (BPS, 2020).



Gambar 3. Nilai Komponen Penyusun IPM Kab. Lombok Barat Tahun 2020-2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

POTRET USIA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR KAB. LOMBOK BARAT

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir adalah rata-rata rentang hidup yang dapat dijalani oleh bayi baru lahir, dengan asumsi bahwa tingkat kematian berdasarkan usia tetap konstan. UHH saat lahir adalah salah satu indikator status kesehatan yang paling sering digunakan. Peningkatan UHH dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk



meningkatnya standar hidup, gaya hidup yang lebih baik dan pendidikan yang lebih baik, serta akses yang lebih besar ke layanan kesehatan yang berkualitas (OECD, 2024). UHH Kabupaten Lombok Barat berada di 72,37 tahun. Angka ini mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 0,43 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sugiantari dan Budiantara (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa angka kematian bayi, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan, dan persentase balita berusia 1-4 tahun yang diberi imunisasi lengkap berpengaruh terhadap angka usia harapan hidup. Selain itu, pendidikan dan tingkat pekerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan angka harapan hidup saat lahir (Vellayati dan Adji, 2019).

Tabel 1. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup Menurut Kelompok Umur di Kab. Lombok Barat, Tahun 2020-2023

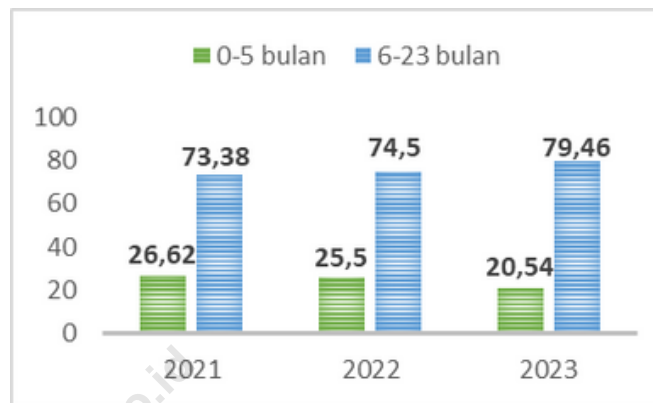
Usia Ibu	2022	2023
(1)	(2)	(3)
15-19	1,36	1,31
20-29	27,06	25,18
30-39	39,29	39,29
40-49	32,28	34,21

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

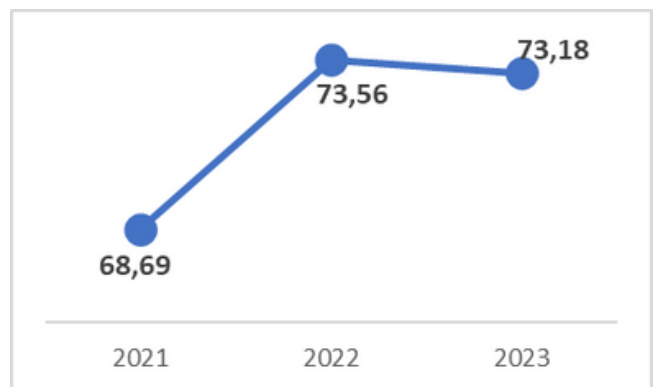
Pernikahan dini masih terjadi di Lombok Barat. Tabel 1 menunjukkan terdapat 1,31 persen ibu yang berusia 15-19 tahun pada tahun 2023. Artinya ada ibu yang terpaksa lebih awal “menamatkan” pendidikannya dari pada usia yang seharusnya. Hal ini tentu saja dapat memberi dampak terhadap pengetahuan ibu terkait pemberian ASI dan imunisasi dasar lengkap.

Terdapat 97,76 persen penduduk 0-23 bulan (batita) yang pernah diberi ASI, dimana sebanyak 20,54 persen penduduk hanya mendapatkan ASI selama 0 sampai 5 bulan dan sebanyak 79,46 persen penduduk mendapatkan ASI selama 6 sampai 23 bulan.

Jika dilihat lebih seksama, terdapat kenaikan persentase penduduk berumur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI selama 6-23 bulan. Artinya semakin banyak orang tua yang paham pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi tiap tahunnya.



Gambar 4. Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama Pemberian ASI, Tahun 2020-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



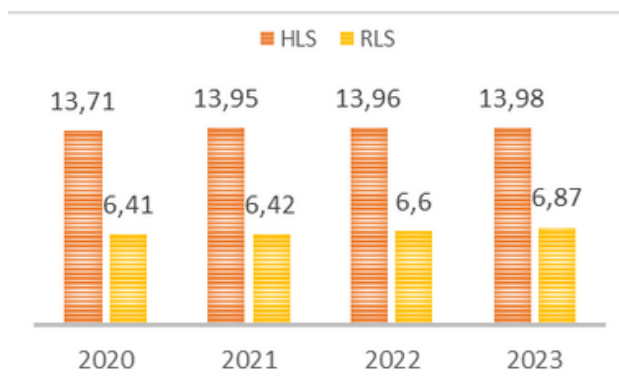
Gambar 5. Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap, Tahun 2021-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap turut memberi pengaruh pada nilai UHH. Partisipasi balita yang mendapatkan imunisasi lengkap di Lombok Barat masih dibawah 75 persen selama tiga tahun terakhir. Bahkan terjadi penurunan partisipasi balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap di tahun 2023. Penurunan ini perlu menjadi catatan dalam evaluasi program kesehatan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

POTRET DIMENSI PENDIDIKAN LOMBOK BARAT

Dimensi pengetahuan dalam IPM diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik. Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas dimasa yang akan datang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. MYS dihitung dengan asumsi bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. (BPS,2024).

Pengaruh langsung HLS terhadap IPM adalah signifikan secara statistik. Hal ini membuktikan meningkatnya HLS di seluruh provinsi Indonesia berpengaruh terhadap peningkatan IPM di Indonesia (Gunandi dan Kismiantini, 2023). Beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi HLS dan RLS, yaitu biaya pendidikan, kemiskinan, angka ketergantungan, dan akses tempat tinggal ke sekolah. Sebagian besar masyarakat masih merasakan beratnya kebutuhan untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama yang bersifat penunjang seperti seragam, buku Pelajaran, dan iuran sukarela yang dipungut sekolah. Tingginya tingkat kemiskinan dan angka ketergantungan di suatu daerah juga berdampak signifikan terhadap tingginya angka putus sekolah. Tidak meratanya lokasi tempat tinggal penduduk khususnya di wilayah yang memiliki aksesibilitas terbatas menyebabkan biaya tinggi untuk transportasi anak untuk sampai ke sekolah (Handoyo & Zulkarnaen, 2019).

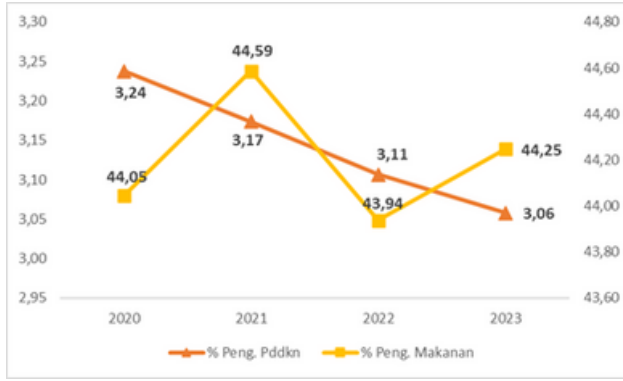


Gambar 6. Angka HLS dan RLS Kab. Lombok Barat, Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik(diolah)

Secara umum angka HLS dan RLS Kab. Lombok Barat meningkat setiap tahunnya. Angka HLS Lombok Barat tahun 2023 adalah 13,98. Artinya harapan lama sekolah penduduk Lombok Barat meningkat menjadi 13,98 yang artinya rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14 tahun atau setara dengan Diploma II. RLS Lombok Barat pada tahun 2023 yakni sebesar 6,87 masih menjadi rapor buruk dalam peningkatan IPM Lombok Barat. Artinya secara rata-rata, penduduk usia 25 tahun ke atas di Lombok Barat hanya menempuh pendidikan formal selama 6,87 tahun, yang artinya rata-rata masyarakat Lombok Barat hanya menempuh pendidikan di hingga bangku kelas 1 SMP.

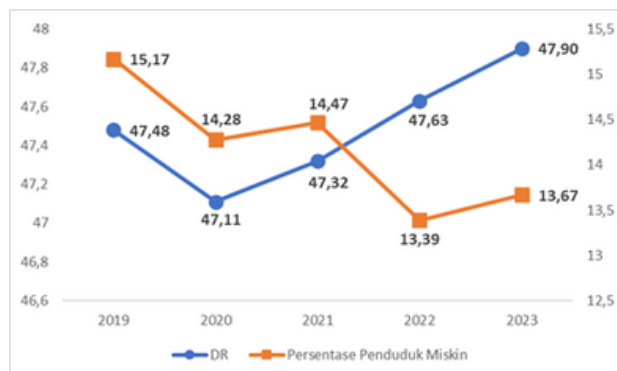
Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka HLS dan RLS adalah kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 13,67 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 546.000/kapita/bulan. Keluarga miskin umumnya masih berfokus pada pemenuhan konsumsi makanan. Selama periode 2020-2023, persentase pengeluaran makanan selalu di atas 40 persen, sementara persentase pengeluaran untuk pendidikan, hanya berkisar 3 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Alokasi biaya pendidikan yang minim menunjukkan bahwa bagi keluarga miskin pendidikan bukan prioritas.



Gambar 7. Persentase Pengeluaran Pendidikan dan Makanan Kab. Lombok Barat, Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tingkat Ketergantungan (*dependency ratio*) menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang (BPS, 2024). Semakin tingginya persentase Tingkat Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tingkat Ketergantungan Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Tingkat Ketergantungan mengalami peningkatan sejalan dengan kenaikan persentase penduduk miskin Lombok Barat. Jika hal ini tidak segera teratasi, akan banyak anak yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dan berefek pada menurunnya HLS dan RLS.

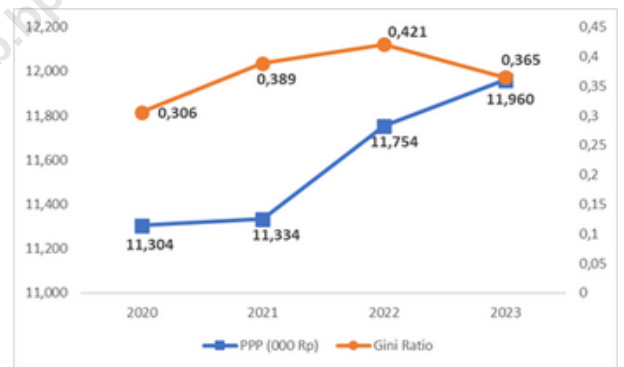


Gambar 8. Tingkat Ketergantungan (*Dependency Ratio*) dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Lombok Barat, Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

STANDAR HIDUP LAYAK DI LOMBOK BARAT

Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita penduduk mencerminkan faktor pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari membaiknya perekonomian di setiap daerah (BPS, 2022). Pengeluaran perkapita akan memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah (Yunita, 2012). Pengeluaran perkapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Indriyani dkk, 2023).

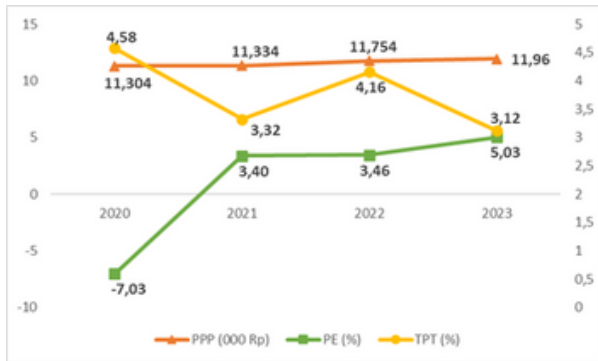


Gambar 9. Pengeluaran Perkapita (PPP) dan *Gini Ratio* Kab. Lombok Barat, Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gini Ratio Lombok Barat pada tahun 2023 menyentuh angka 0,365. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka 0,365 menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di Lombok Barat. Perbedaan antara kaya dan miskin masih nyata. Perlu upaya konkret dari Pemkab untuk memperkecil gap tersebut.

Beberapa faktor diduga mempengaruhi besaran pengeluaran perkapita antara lain laju pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Wulandari dan Budiantara, 2014).



Gambar 10. Pengeluaran Perkapita, TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lombok Barat, Tahun 2020-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Memperhatikan Gambar 10, terlihat pola bahwa peningkatan pengeluaran perkapita penduduk berjalan beriringan dengan menurunnya tingkat pengangguran dan disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Sehingga kuat dugaan bahwa turunnya tingkat pengangguran, dan kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pengeluaran perkapita. Penelitian inferensia terkait hal tersebut perlu dilakukan untuk menguatkan dugaan tersebut.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat patut diapresiasi atas keberhasilannya dalam meningkatkan angka IPM tiap tahunnya. Namun jika melihat laju pertumbuhan IPM yang cukup stagnan mengisyaratkan perlunya kajian kebijakan yang ada. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan:

1. Sosialisasi Pemberian ASI Eksklusif dan Program Kejar Imunisasi Dasar Lengkap. Pemerintah Kab. Lombok Barat secara rutin melakukan sosialisasi pemberian ASI Eksklusif melalui para tenaga kesehatan (nakes). Sosialisasi dapat menggandeng organisasi seperti Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) untuk memberikan edukasi pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi.

Program Kejar Imunisasi Dasar Lengkap adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Pemkab dalam rangka meningkatkan partisipasi balita yang mendapatkan imunisasi dasar. Program ini menggunakan sistem jemput bola, dimana nakes akan mengunjungi balita yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

2. Bantuan dan subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi. Saat ini Pemerintah memang telah menggelontorkan berbagai dana bantuan pendidikan seperti BOS (Belanja Operasional Sekolah), BAUSKM (Bantuan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin), maupun pemberian beasiswa. Untuk memastikan agar bantuan diterima oleh orang yang tepat, pengawasan melekat perlu dilakukan.

3. Pemberian program bantuan bagi wirausahawan muda untuk memecah rantai pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Program bantuan ini diberikan kepada wirausahawan muda yang mampu mengajukan proposal usaha yang menjanjikan. Pemberian bantuan diberikan secara bertahap sesuai dengan mempertimbangkan capaian usaha yang diraih selama periode tertentu.

4. Selain program untuk wirausahawan muda, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani Pemkab Lombok Barat juga dapat membuat program untuk petani. Contohnya pemberian pinjaman dengan bunga nol persen kepada petani. Pemkab Lombok Barat dapat bekerja sama dengan bank untuk memberikan pinjaman kepada petani maupun nelayan. Jumlah pinjaman dapat dinaikkan untuk petani dan nelayan yang berhasil panen sesuai harapan.

REFERENSI

- BPS. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2021*.
 -----. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*.
 -----. (2024). *Indikator Strategis Statistik Sosial*.
 -----. (2024). *Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023*

Gunandi, Afriadi dan Kismiantini. (2023). *Penerapan Analisis Jalur Pada Faktor-faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Statistika dan Sains Data.

Handoyo, A. D., & Zulkarnaen. (2019). *Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional, 1(1), 21–24.

Indriyani, Sri dkk. (2023). *Analisis Pengaruh RLS, Pengeluaran Perkapita, UHH, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di KBI dan KTI*. Gorontalo: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah.

Oxford Martin School. (2024). *Life Expectancy*. <https://ourworldindata.org/life-expectancy#:~:text=In%202021%2C%20the%20global%20average,economic%20growth%2C%20and%20poverty%20reduction>. Diakses pada 2 September 2024.

Rahmawati, Nan. (2023). *Strategi Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*. Bandung: Jurnal Pendidikan Islam.

Sugiantari, A.P, Budiantara, I.N. (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline*. Institut Teknologi Surabaya: Jurnal Sains dan Seni POMITS, 2(1), 37-41.

Vellayanti, W. I., Adji A. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Saat Lahir dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Wulandari, I.D.A.M.I., Budiantara, I.N. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Penduduk Miskin dan Pengeluaran Perkapita Makanan di Jawa Timur menggunakan Regresi Nonparametrik Birespon Spline*. Institut Teknologi Surabaya: Jurnal Sains dan Seni POMITS, 3(1), 30-35.

Yunita, Mahrany. (2012). *Ilmu Ekonomi Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan*. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. UNHAS